

Wawancara Khusus

Dody Budiartman
Staf Ahli Menko Kesra

NEGARA KOMITMEN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Negara seyogyanya merupakan sebuah organisasi masyarakat, memiliki batas wilayah yang jelas secara hukum, yang berdiri kokoh secara legal konstitusional untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara luas baik ekonomi, sosial budaya, dan agama. Atas nama kepentingan masyarakat, negara membentuk peraturan-peraturan atau *role of nations* yang menurut Meriam Budiarto bersifat "memaksa", "memonopoli", dan "mencakup semua". Rumusan ini lebih dekat dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia seperti terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Konsep negara hukum adalah konsep negara modern yang menempatkan rakyat dalam posisi sentral, di mana rakyat mendapat penghargaan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang dilindungi hak hidupnya.



Kunci utama mewujudkan bangsa yang sejahtera adalah negara yang kuat dan efektif dalam menyelesaikan sejumlah masalah bangsa atau rakyatnya, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) misalnya, adalah sistem kenegaraan yang memberikan keleluasaan intervensi negara melalui kebijakan afirmatif bagi upaya menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental dimaksud. Konsep ini sejalan dengan falsafah negara Indonesia Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang merupakan fondasi bagi mewujudkan negara yang sejahtera.

Akan tetapi untuk mewujudkan negara kuat demi kesejahteraan bangsa bukanlah perkara mudah. Pada masa pemerintah Orde Baru misalnya, negara tampil begitu kuat dan bahkan dominan dan berhasil menciptakan rasa aman serta berhasil melaksanakan pembangunan secara kontinyu dengan pertumbuhan ekonomi tinggi secara stabil. Namun sayangnya distribusi hasil pembangunan kurang berhasil secara merata, sehingga kesejahteraan rakyat belum dapat dicapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah penerapan sistem politik otoriter, sehingga hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh elite dan para pebisnis kelas tinggi.

Sekarang setelah reformasi, Indonesia memasuki sistem politik yang demokratis. Namun oleh sementara kalangan menilai negara kurang begitu tampil kuat. Dalam periode ini, negara cenderung mengalami proses pelemahan secara cukup signifikan, sehingga menjadi tidak otonom terhadap kelompok dominan maupun masyarakat, dan bahkan terhadap elemen negara itu sendiri. Artinya, negara sendiri tidak otonom terhadap birokrasi pemerintah,

termasuk pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah jajaran eksekutif, dan terhadap militer. Kondisi seperti ini pemerintah atas nama negara akan sulit mengambil kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun untuk mengetahui kondisi sesungguhnya negara saat ini dalam kaitan dengan kemampuan mensejahterakan rakyat, berikut ini kutipan hasil wawancara M. Abduh Sandiah dari Tim Redaksi Jurnal Dialog Kebijakan Publik dengan Dody Budiartman, Staf Ahli Menko Kesra Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia.

Sudah 67 tahun Indonesia merdeka, tetapi mengapa banyak pandangan yang menilai Negara belum optimal member kesejahteraan kepada bangsanya?

Memang kalau kita melihat dari sisi usia sejak Indonesia merdeka maka boleh dibilang negara ini sudah cukup dewasa karena sudah berusia 67 tahun. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat memang sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, upaya seperti itu tetap ada. Tetapi dalam upaya-upaya tersebut tentunya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya pada masa awal kemerdekaan. Masih ada pengaruh kolonialisme Belanda sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terganggu. Kemudian setelah menjelang tahun 1950-an upaya mensejahterakan masyarakat terganggu dengan situasi politik dan keamanan pada saat itu. Ada gerakan-gerakan seperti PRRI, Permesta, kemudian tidak adanya stabilitas politik, jatuh bangun Kabinet sudah mulai tahun 1949 sampai tahun 1965, kurang lebih duapuluh lima kali gonta ganti kabinet. Situasi negara tidak kondusif, tidak stabil sehingga sulit melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Setelah

masyarakat?

Jika diukur kesejahteraan itu dengan menurunnya angka kemiskinan, keterjangkauan pendidikan dan semakin baik pelayanan kesehatan, maka saat ini sudah baik dan nanti kita akan lebih baik lagi. Pada tahun 2014 mulai diterapkan sistem Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN)? Semua rakyat Indonesia akan terjamin pelayanan kesehatan melalui premi asuransi. Begitu juga dengan pendidikan, komitmen pemerintah untuk memenuhi perintah UUD 1945 bahwa anggaran belanja pendidikan harus 20 persen dari APBN, sehingga pelayanan pendidikan akan lebih baik.

Kenapa program kesejahteraan cenderung bukan membangun ekonomi yang memperkuat kemandirian rakyat tetapi lebih berbentuk pemberian bantuan yang tidak produktif?

Kebijakan penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan seperti saat ini karena tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat bervariasi. Ada yang sangat miskin, ada yang miskin, ada yang hampir miskin, ada yang setengah kaya, yang kaya dan yang sangat kaya. Tentu kebijakan dan pelayanan tidak disamaratakan. Bagi yang klasternya sangat miskin dan miskin itu diberi bantuan yang bersifat langsung, seperti dalam bentuk Raskin, BOS dan Jamkes. Dari satu sisi ini diupayakan peningkatan pendapatan, dan di sisi lain dilakukan penekanan terhadap pengeluaran mereka. Klaster kedua, kebijakan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, karena kondisi mereka relatif normal dalam berkomunikasi dan mengorganisir apa yang menjadi kebutuhan dan diusulkan kepada pemerintah seperti jalan, listrik, pengairan dan sebagainya. Berdasarkan usulan masyarakat tersebut pemerintah mengucurkan dana, kemudian di-

laksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun dibayar oleh pemerintah. Naik lagi ke klaster ketiga, yakni mereka sudah punya kemampuan mengembangkan usaha. Oleh pemerintah diberi kredit usaha rakyat dengan jaminan bentuk usaha itu sendiri. Jadi tidak semua bantuan diberikan dalam bentuk gratis dan tidak produktif, tetapi juga ada yang bersifat produktif.

Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang belimpah, tetapi terkesan sulit meratakan kesejahteraan kepada segenap rakyatnya. Kesalahannya terletak dimana?

Persoalannya sampai saat ini teknologi yang kita miliki hanya sampai pada tingkat eksplorasi, sehingga sebagian besar sumber daya alam yang kita hasilkan adalah yang belum diolah, yang berarti nilai ekonomisnya kecil. Nanti kalau teknologi itu sudah dikuasai Indonesia maka pengolahan sumberdaya alam akan semakin mendapat nilai tambah. Sekarang ini pemerintah sudah punya program yang bersifat stimulan, mendorong para peneliti melakukan penelitian di berbagai bidang untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Prioritas saat ini adalah untuk mendapatkan teknologi tepat guna untuk masyarakat, seperti teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian dan teknologi pengolahan hasil perikanan. Program itu akan terus dikembangkan.

Apakah strategi pembangunan yang dijalankan saat ini sudah tepat menuju kesejahteraan bangsa?

Kalau dari sisi kebijakan bisa dikatakan sudah pada arah yang benar. Namun pada tingkat pelaksanaannya di lapangan, memang masih diperlukan pembenahan, terutama terhadap sumber daya manusianya. Misalnya pada tahun 2011, dana PNPM di Deputi VII

tahun 1965, baru mulai tercipta stabilitas politik dalam negeri, artinya pemerintah cukup stabil, mulai masa Orde Baru sampai Orde Reformasi sekarang ini, barulah terbuka kesempatan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tetapi bukan berarti luput dari permasalahan-permasalahan yang ada, seperti minimnya infrastruktur, kurangnya sarana perhubungan dan transportasi termasuk untuk menjangkau pulau-pulau terpencil. Kemudian masalah pertumbuhan penduduk yang begitu besar, meskipun pada masa Orde Baru rata-rata di bawah dua persen, tetapi sangat mempengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Memasuki masa reformasi hingga sekarang rakyat miskin masih tersisa 11,9 persen. Masyarakat yang masih miskin ini diupayakan agar turun menjadi delapan persen. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit. Kendala yang dihadapi baik di lingkup nasional, regional, maupun terkait dengan lingkup global. Faktor pengaruh global, seperti ketika kita sedang meningkatkan kesejahteraan rakyat, tiba-tiba terjadi krisis ekonomi dunia, terutama melanda Amerika Serikat yang sangat berdampak pada terjadinya krisis ekonomi dalam negeri. Kemudian saat ini terjadi lagi krisis ekonomi dunia dimana beberapa negara Eropa seperti Yunani, Spanyol dan Portugal mengalami kebangkrutan, sehingga juga mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Kendala yang diakibatkan oleh masalah dalam negeri sendiri, seperti banyak terjadi kerusuhan sosial, banyak orang miskin baru akibat bencana alam umpamanya, sehingga angka kemiskinan sulit untuk ditekan.

Berbeda dengan Indonesia, negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan yang meskipun juga dilanda krisis ekonomi, tetapi karena kondisi *basic* dan infrastruktur ekonomi mereka lebih baik dan solid, sehingga relatif lebih mudah

dan cepat memulihkan kembali kondisi perekonomian mereka. Sedangkan Indonesia infrastruktur ekonominya tidak sesolid Jepang dan Korea Selatan, sehingga wajar kalau untuk memulihkannya perlu membutuhkan waktu cukup lama. Ke depan kondisi *basic* dan infrastruktur perekonomian kita terus dibenahi sehingga memiliki kekuatan dan solid dalam menghadapi krisis.

Ada penilaian bahwa kondisi negara kita saat ini tidak terlalu kuat karena kesalahan sistemnya, yakni tidak konsisten dengan sistem presidensial, sehingga sulit mewujudkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Apa betul demikian?

Justru kondisi negara kita saat ini cukup kuat dengan sistem presidensial, karena semua kekuasaan di tangan presiden. Artinya apa pun yang dilakukan, itu merupakan keputusan presiden. Termasuk ketika dalam pembentukan kabinet, presiden melibatkan banyak partai untuk memperkuat pemerintahannya. Itu merupakan keputusan dan strategi presiden. Jadi sistem multi partai di Indonesia tidak ada kaitan dengan sistem parlementer. Dengan sistem seperti sekarang ini, justru menunjukkan proses pengambilan kebijakan lebih mudah dan bagus. Seperti pengambilan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat, sudah berapa banyak dana (ratusan triliun rupiah) yang berhasil dikucurkan untuk mememberdayakan masyarakat melalui program PNPM. Program itu diusulkan oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR, merupakan hasil dari strategi presiden dalam memanfaatkan sistem multi partai.

Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan kebijakan mensejahterakan

Kemenko Kesra sebesar kurang lebih 200 milyar rupiah dalam penyalurannya tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena ada oknum fasilitator yang melakukan penyelewengan di lapangan terhadap dana bantuan untuk masyarakat itu. Lain halnya dengan persoalan di Papua, masalah pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM adalah karena tidak ada atau kurangnya tenaga fasilitator. Tidak ada orang yang mau pergi ke daerah pelosok Papua untuk membimbing masyarakat di sana, seperti bagaimana mereka membuat proposal untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan riil mereka. Akibatnya banyak dana PNPM dari tahun ke tahun yang diberikan menumpuk di daerah, tidak disalurkan. Untuk mencegah terjadinya hal itu perlu penegakan hukum secara tegas dan konsekwen. Diakui bahwa saat ini penegakan hukum di negeri ini lemah, sehingga orang berani melakukan penyelewengan.

Otonomi Daerah memiliki semangat percepatan pemerataan pembangunan di semua daerah. Bagaimana Bapak melihat daerah memanfaatkan sumber daya alamnya secara tepat untuk mensejahterakan rakyat setempat?

Semanagat UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tidak lagi terpusat, tetapi sebagian besar sudah dilimpahkan ke daerah, yakni di Kabupaten dan Kota. Hanya dalam pemahamannya yang sering dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang bagus. Sebenarnya dengan kewenangan itu, Pemerintah Daerah bisa leluasa melakukan pembangunan secara lebih baik. Namun memang ada hambatannya. Salah satunya adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, antara satu

undang-undang dengan undang-undang yang lain tidak sinkron. Begitu juga ada peraturan daerah (Perda) yang berlawanan dan tidak sinkron. Jadi untuk memperbaiki kondisi pembangunan di daerah, harusnya membenahi dulu peraturan perundang-undangannya. Contoh, Undang-Undang tentang Pokok Agraria Tahun 1962 sangat bertentangan dengan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dengan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, dan dengan Undang-Undang tentang Kehutanan dan Perkebunan. Peraturan perundang-undangan yang berlawanan dan tumpah tindih ini harus disinkronkan atau di harmonisasikan terlebih dahulu agar di lapangan tidak terjadi benturan antara kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, serta pemanfaatan kelemahan itu untuk melakukan penyimpangan dan manipulasi.

Kebijakan apa yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan pembangunan antara daerah yang kaya dan daerah yang minim sumber daya alamnya?

Untuk itu pemerintah punya kebijakan yang dikenal dengan dana dekonsentrasi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk mengatur keseimbangan pembangunan di daerah, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah yang kaya dengan sumberdaya alam dan daerah yang minim atau tidak memiliki sumber daya alam.

Masih terjadi tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya daerah antara pemerintah Kabupaten/kota, dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kenapa hal itu terjadi dan bagaimana mengatasinya?

Ini terjadi karena adanya peraturan

perundang-undangan yang tidak sinkron, Bupati atau Wali Kota yang punya interpretasi sendiri bahwa menurut aturan-aturan yang dianut itu menjadi kewenangan mereka. Tetapi ada yang menjadi kewenangan pusat yang tidak bisa diserahkan kepada daerah. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah segera mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada lagi multi tafsir. Mungkin setiap kebijakan dari pemerintah pusat itu memiliki urgensi yang menjadi keharusan.

Kira-kira berapa lama lagi negara Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara yang kuat, sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan rakyat?

Prinsipnya sulit memprediksi kapan itu akan terjadi. Tetapi tergantung pada, bagaimana semua elemen dalam masyarakat memahami tugas dan fungsinya masing-masing, bahwa kita ini hidup bernegara dan bermasyarakat untuk mencapai keinginan itu. Misalnya sebagai seorang pengusaha, tidak

hanya berpikir tentang bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya meskipun dengan cara-cara yang tidak baik. Para Ilmuan, ikut berupaya untuk menemukan teknologi yang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan para penegak hukum, apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan profesional tanpa dipengaruhi dengan faktor kepentingan. Di sini diperlukan pemahaman tentang "*nation and character bulding*" yang melahirkan wawasan kebangsaan semangat nasionalisme, semangat membangun bangsa perlu dimiliki oleh setiap warga negara dalam posisi apa pun dia. Jadi beberapa lama dan seberapa kemajuan yang dicapai negara ini ke depan sangat tergantung pada peranan setiap orang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain membangun karakter bangsa, juga diperlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, agar semua orang bermain sesuai aturan yang ada dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.





SEJAHTERAKAN RAKYAT MISKIN

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jakarta Tuntut Sejahtera melakukan aksi unjuk rasa tentang layanan publik untuk rakyat miskin di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya mereka meminta Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mempermudah semua akses fasilitas dan layanan umum seperti Kesehatan, Air, Akte Kelahiran, Pendidikan gratis untuk rakyat miskin.

FOTO ANTARA/M Agung Rajasa

